

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG  
PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN  
ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan usulan perubahan pejabat/pegawai karena masa purna tugas Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara per 31 Mei 2018, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tentang Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Juli 2018

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG PETUGAS PENGELOLA  
PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II  
TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

NOMOR : 42 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS  
PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Biro Umum dan Keuangan	450.000
2	Ketua	Satriyo Wibowo	Biro Umum dan Keuangan	400.000
3	Sekretaris	Kurnia Sari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
4	Anggota	1. Intan Dana Lestari	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		2. Angga Fariz Prayoga	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		3. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		4. Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		5. Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		6. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		7. Setiawan Rahandi Sabri	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana	300.000
		8. Andi Setya Nugraha	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		9. Dede Agustina Muhajirin	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000
		10. Eva Sinaga	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
		11. Oktrita Purwantari Rahayu	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
		12. Syukri	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000
		13. Winny Adlina Pratomo	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
		14. Rr.Ajeng Kusharyeni Pratiwi	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
		15. Vialita Octaviani	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
		16. Kemala De Kristie	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
		17. Juniarty Erika M. S.	Pusdiklat	300.000
		18. Manshur Riadli	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
		19. Ali Masrochan	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
		20. Hendra Damendra Numberi	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
		21. Inamawati Mastuti Dewi	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
		22. Bretty Rachayu Budyanty	Inspektorat	300.000

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA